

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Adanya invasi Rusia ke Ukraina, 24 Februari 2022 membuat Swedia dan Finlandia mengajukan permohonan bergabung keanggotaan NATO pada 18 Mei 2022. *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) yakni organisasi militer skala internasional dimana terdiri atas 28 negara dari wilayah Eropa, 2 negara yang berada di Amerika Utara, dan 1 negara yang terletak di kawasan Eurasia. Mulai berdiri pada 4 April 1949 melalui penandatanganan Perjanjian Atlantik Utara. NATO memiliki markas besar yang berada di Brussels. Pada mulanya, NATO bertujuan menghentikan dampak komunis dari Uni Soviet saat perang dingin¹. Dasar terbentuknya NATO tertuang pada *North Atlantic Treaty* dimana menciptakan keseimbangan ideologi dari adanya ancaman dengan pendekatan keamanan, serta menjaga keamanan bersama dengan asas solidaritas dan pertahanan militer². Pada tahun 2023, NATO memiliki 31 negara anggota. Pada tahun 1949, terdapat 12 negara pendiri NATO. Kemudian disusul oleh 19 negara lainnya, salah satunya adalah Turki. Turki termasuk dalam anggota aliansi militer NATO yang resmi bergabung saat masa perang dingin, 18 Februari 1952. Sejak

¹ BBC News, *What Is NATO, Which Countries Are Members And When Might Ukraine Join?*, <https://www.bbc.com/news/world-europe-18023383> (3/10/2024)

² Kementerian Luar Negeri Indonesia, *Kerja Sama Regional North Atlantic Treaty Organization (NATO)*, https://Kemlu.Go.Id/Portal/Id/Read/6073/Halaman_List_Lainnya/North-Atlantic-Treaty-Organization-Nato# (3/10/2024)

saat itulah Turki mendapat banyak keuntungan dengan bergabung NATO khususnya untuk keamanan nasional Turki³.

Keamanan nasional Turki di bawah kepemimpinan Erdogan dinilai mampu melesat dan mempengaruhi politik-politik global. Bahkan Turki dianggap menjadi kekuatan baru militer dan ekonomi di kawasan⁴. Turki memiliki peran penting di NATO, Turki diharapkan dapat membawa pendekatan dengan berdialog sehingga tidak adanya unsur militer. Selain itu, Turki menjadi benteng pertahanan aliansi guna mencegah adanya ancaman dari kawasan-kawasan lain terutama kawasan Timur Tengah. Arti NATO untuk Turki yakni guna melawan terorisme, hal ini lah kemudian meningkatkan intensitas mereka dalam bentuk upaya menanggulangi terorisme dan menjaga keamanan⁵.

Salah satu cara menjaga keamanan Turki yakni berhadapan dengan kelompok militan Kurdi yang mencoba mendirikan negara di wilayah tertentu di Turki. Dilansir dari (BBC News Indonesia, 2022) penolakan Turki terhadap Swedia disinyalir dari adanya tudingan Swedia mendukung perlawanan terhadap *Parti Karkerani Kurdistan* (PKK) juga *Yekîneyên Parastina Gel* (YPG)⁶. Selain itu, Swedia juga dituding menampung sejumlah anggota PKK dan melakukan embargo persenjataan kepada Turki sejak tahun 2019 setelah adanya serangan militer yang saat itu memusatkan YPG di Suriah Utara. Diperparah melalui pembakaran Al-

³ North Atlantic Treaty Organization, *Türkiye And NATO*, https://www.nato.int/cps/en/natohq/declclassified_191048.htm (3/10/2024)

⁴ Evren Kucuk, *Scandinavian Studies In Turkey*, Vol. 2 No. 33 "İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi", Nisan 2019 : 648, 10.18261/Issn1504-3096-1987-04-07

⁵ Republic Of Türkiye Ministry Of Foreign Affairs, *Turkey- NATO Together For Peace And Security Since 60 Years*, <https://www.mfa.gov.tr/Turkey-Nato-Together-For-Peace-And-Security-Since60-Years.En.Mfa> (3/10/2024)

⁶ BBC News Indonesia, *Diperangi Erdogan, tak diakui di Suriah, siapa sesungguhnya bangsa Kurdi?*, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-50068256> (3/10/2024)

Qur'an Rasmus Paludan pada Januari 2023⁷. Pada saat hari besar Adha tepatnya di surau Stockholm kembali aksi islamophobia Al-Qur'an yang dihadiri oleh 200 orang serta disinyalir polisi mengizinkan aksi ini. Tentunya hal ini kecaman berbagai negara dan Turki. Pemerintah Swedia angkat tangan dan tutup telinga seolah memberikan dukungan terhadap kelompok Kurdi dalam melakukan aksinya⁸.

Adanya ketidakpuasan kelompok Kurdi terhadap perlakuan Turki seperti contohnya tindak diskriminasi terhadap kelompok Kurdi, dugaan mengenai identitas mereka hingga banyaknya konflik antara Turki dan juga kelompok Kurdi, maka para kaum Kurdi ini mencari perlindungan di Swedia, dengan alasan utama mereka yakni Swedia adalah negara yang memberikan suaka politik kepada kelompok ataupun individu yang sedang berkonflik atau tidak mendapat keadilan di negara mereka⁹. Dugaan Swedia mendukung dan melindungi Kelompok Kurdi membuat pengajuan Swedia bergabung NATO pada tahun 2022 mengalami penolakan oleh negara Turki, sedangkan Finlandia telah resmi bergabung NATO pada Selasa, 4 April 2023¹⁰. Swedia juga Finlandia negara netral yang akhirnya memilih untuk bergabung dengan NATO karena adanya invasi oleh Rusia secara besar-besaran terhadap Ukraina pada Februari 2022 lalu.

⁷ Civil Rights Defenders, *Statement On Rasmus Paludan's Latest Qur'an Burning In Sweden*, <https://crd.org/2023/02/01/Statement-On-Rasmus-Paludans-Latest-Quran-Burning-In-Sweden/> (4/10/2024)

⁸ Al Jazeera, *Quran Desecrated At Sweden Mosque During Eid Al-Adha*, <https://www.aljazeera.com/news/2023/6/28/quran-desecrated-in-sweden-during-eid-al-adha-holiday> (4/10/2024)

⁹ Anna Wieslander, *What Makes An Ally? Sweden And Finland As NATO's Closest Partners*, *Journal Of Transatlantic Studies* (2019), <https://doi.org/10.1057/S42738-019-00019-9>.

¹⁰ Deutsche Welle, *Resmi! Finlandia Jadi Anggota Ke-31 NATO*, Deutsche Welle, <https://www.dw.com/id/resmi-finlandia-jadi-anggota-ke-31-nato/a-65222293> (4/10/2024)

Invasi Rusia kepada Ukraina membuat ketidakstabilan di wilayah Swedia dan Finlandia hingga disebutkan bahwa Eropa utara sangat rentan kala itu. Bergabungnya kedua negara tersebut ke dalam NATO untuk mendapat jaminan keamanan sesuai yang tertera pada pasal 5 NATO dimana ketika terjadi serangan kepada setiap negara yang menjadi anggota NATO maka anggota lain berhak ikut membantu, dengan ini memicu rasa aman kedua negara Swedia dan Finlandia dari serangan militer milik Rusia. Turki menyetujui akses Swedia bergabung NATO setelah Swedia melaksanakan komitmen dalam penanganan PKK dan YPG melalui Trilateral Memorandum pertama dengan Swedia, Finlandia dan Turki pada tanggal 28 Juni 2022 dan lanjutan dari Trilateral Memorandum pada tanggal 10 Juli 2023, serta adanya dorongan dari pihak NATO dan sekutu Barat yakni Amerika Serikat, Jerman dan Prancis¹¹. Sehingga pada tahun 2023 bulan Oktober negara Turki resmi menyetujui protokol terhadap akses Swedia bergabung NATO¹². Dilansir dari (Deutsche Welle, 2024) pada 26 Januari 2024, Turki menandatangani dokumen persetujuan Swedia bergabung NATO dan pada 7 Maret 2024 Swedia resmi menjadi anggota ke 32 di NATO¹³.

Maka berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik meneliti mengenai adanya reorientasi sikap politik Turki terkait keanggotaan Swedia di *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) dimana Turki memegang peranan dalam menyetujui

¹¹ Muhammad Syaddad Hisbullah, *Strategi Negosiasi Pemerintah Swedia Terhadap Negara Turki Dalam Upaya Meratifikasi Keanggotaan NATO Tahun 2023*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia, Hal. 2.

¹² *Ibid.*, Hal. 4

¹³ Deutsche Welle, *Anggota Parlemen Turki Akhirnya Restui Swedia Gabung NATO*, <https://www.dw.com/id/anggota-parlemen-turki-akhirnya-restui-swedia-gabung-nato/a-68068373> (3/10/2024)

keanggotaan Swedia di NATO. Berbeda dengan Finlandia yang lebih dulu resmi bergabung NATO pada tahun 2023, sedangkan Swedia baru resmi bergabung NATO pada tahun 2024. Turki mulanya menolak Swedia selama 20 bulan lamanya, kemudian menerima dan menandatangani bergabungnya Swedia di NATO. Selain itu, masih sedikitnya penelitian yang menganalisis bagaimana Turki mengubah sikap politiknya dari penolakan Swedia menjadi dukungan penuh. Sebagian besar penelitian sebelumnya membahas mengenai isu hubungan Turki dengan NATO secara umum, kebijakan keamanan Turki oleh adanya PKK dan YPG hingga peran Turki dalam konflik di Timur Tengah dan Suriah. Adanya Kesenjangan penelitian ini tentunya memberikan peluang bagi penulis untuk mengisi kekurangan tersebut. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami sikap Turki dalam menghadapi tekanan dari NATO dan Sekutu Barat yakni Amerika Serikat, Jerman dan Prancis terhadap adanya ancaman PKK dan YPG di negara Swedia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dari tulisan yang berjudul “Reorientasi Sikap Politik Turki Terkait Keanggotaan Swedia di *North Atlantic Treaty Organization* (NATO)”, maka rumusan masalah sebagai berikut:

Mengapa Turki mengubah orientasi sikap politiknya terkait keanggotaan Swedia di *North Atlantic Treaty Organization* (NATO)?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui alasan Turki merubah sikap politiknya terkait keanggotaan Swedia di NATO.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Praktis, penulis berharap pada penelitian ini memudahkan para pembaca untuk menganalisa perubahan orientasi sikap politik Turki terkait keanggotaan Swedia di NATO. Serta, penulis berharap agar penelitian ini dijadikan sebagai sumber referensi dan acuan bagi penelitian lanjutan para pembaca.
- b. Ditinjau dalam aspek akademis, penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat dalam aspek akademis dengan memberikan sumbangan terhadap pembahasan kajian hubungan internasional.

1.4 Penelitian Terdahulu

Sebagai pertimbangan dalam melakukan penelitian, penulis memaparkan penelitian terdahulu yang tentunya berkaitan dengan tema yang ditulis peneliti. Hal ini dilakukan, guna peneliti dalam mengkaji permasalahan lebih lanjut. Selbihnya guna memperkuat setiap argumen yang ada dalam penelitian ini.

Pertama adalah skripsi karya Muhammad Syaddad Hisbullah berjudul "Strategi Negosiasi Pemerintah Swedia Terhadap Negara Turki Dalam Upaya Meratifikasi Keanggotaan NATO Tahun 2023". Secara umum, penelitian ini membahas mengenai strategi dan taktik negosiasi yang dilakukan Swedia kepada

Turki dalam menyetujui Swedia di NATO periode tahun 2022-2023. Di dalam skripsi ini membantu penulis dalam memandang adanya berbagai upaya serta tahapan proses negosiasi kedua negara hingga Turki yang awalnya menolak Swedia pada akhirnya menyetujui Swedia bergabung dalam NATO¹⁴. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni membahas mengenai bagaimana dinamika kedua negara dalam bernegosiasi keanggotaan NATO. Sementara perbedaannya yakni penelitian ini menitik beratkan Swedia sebagai objek penelitian serta penggunaan teori yang berbeda, sehingga menghasilkan hasil penelitian yang berbeda pula.

Kemudian yang kedua yakni penelitian yang ditulis oleh Ilham Rilin Fiadi berjudul "*Towards NATO Membership: Looking into the End of Sweden's Neutrality Amidst Strategic Shift in Europe*". Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor pendorong yang menyebabkan Swedia mengajukan permohonan keanggotaan NATO yang signifikan pada tahun 2022, dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal. Serta adanya analisis sistemik menyoroti ancaman dari Rusia hingga dinamika keamanan di Eropa¹⁵. Kesamaan penelitian ini terletak pada adanya ancaman dari Rusia sebagai pendorong perubahan dalam kebijakan luar negeri, baik untuk Swedia maupun untuk Turki dalam merespons permintaan keanggotaan NATO. NATO dipandang sebagai penjamin keamanan yang lebih kuat kepada anggotanya. Dalam penelitian ini, Swedia maupun Turki, memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan mengenai NATO. Penelitian

¹⁴ Muhammad Syaddad Hisbullah, *Strategi Negosiasi Pemerintah Swedia Terhadap Negara Turki Dalam Upaya Meratifikasi Keanggotaan NATO Tahun 2023*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia, Hal. 58.

¹⁵ Ilham Rilin Fiadi, *Towards NATO Membership: Looking Into The End Of Sweden's Neutrality Amidst Strategic Shift In Europe*, Hasanuddin Journal Of Strategic And International Studies, Vol, 2, No, 2, Jakarta: Islamic University, Hal. 78.

ini memiliki perbedaan pada bagian teori serta lebih menekankan pada Swedia sebagai objek penelitian.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Theo Tsappos dengan judul "*Sweden – “a Safe Haven” for Terrorists? Investigating the Strategic Elements in Türkiye’s Narrative of Sweden During the NATO Accession Process*". Di mana dalam penelitian ini membahas mengenai narasi Turki tentang Swedia selama proses aksesinya NATO¹⁶. Persamaan pada penelitian ini adanya tuntutan Turki kepada Swedia mengenai teroris yang mengancam seperti PKK karena dianggap sebagai ancaman bagi Turki dan NATO. Bagaimana Turki memanfaatkan posisinya dalam proses keanggotaan NATO untuk mencapai tujuan politik tertentu. Turki menggunakan isu terorisme sebagai alat negosiasi untuk mendapatkan konsesi dari Swedia dan NATO dan sikap politik Turki memengaruhi jalannya proses aksesinya Swedia ke NATO, di mana Swedia harus memenuhi sejumlah syarat yang diajukan oleh Turki. Kemudian perbedaannya yakni pada teori yang digunakan serta rentang tahun penelitiannya yakni 2023.

Keempat yakni penelitian yang ditulis oleh Vesa Kanninen dengan judul "*Gallup Democracy in Exercising the NATO Membership Option: The Cases of Finland and Sweden*". Dalam penelitian ini membahas keputusan Finlandia dan Swedia untuk bergabung NATO setelah invasi Rusia ke Ukraina. Artikel ini mencatat bahwa hasil survei Gallup mendorong perubahan sikap publik secara signifikan terhadap keanggotaan NATO di kedua negara. Di Finlandia, dukungan

¹⁶ Theo Tsappos, *Sweden – “A Safe Haven” For Terrorists? Investigating The Strategic Elements In Türkiye’s Narrative Of Sweden During The NATO Accession Process*, Tesis, Swedia: Political Science, Uppsala University, Hal. 34.

publik terhadap NATO meningkat drastis dari 21-30% menjadi 79% dalam beberapa bulan setelah invasi Rusia. Proses ini didorong oleh persepsi ancaman terhadap keamanan nasional, yang mempercepat tindakan politik untuk bergabung dengan aliansi pertahanan tersebut. Swedia mengikuti jejak Finlandia meskipun memiliki sejarah panjang netralitas. Keduanya mengajukan aplikasi bersama pada Mei 2022, dengan Turki menambahkan fase tawar-menawar terkait kondisi tertentu sebelum mendukung aplikasi tersebut¹⁷. Persamaan pada penelitian ini yakni Turki sebagai pemegang peran penting dalam memberikan dukungan dengan memberikan syarat khusus terkait keamanan dan isu terorisme. Adanya perubahan sikap politik baik Finlandia/Swedia maupun Turki yang dipicu oleh ancaman dari Rusia dengan mempertimbangkan keamanan nasional keputusannya dalam berpolitik mengenai keanggotaan NATO. Kemudian perbedaannya yakni fokus utama pada penelitian ini pada Finlandia dan Swedia dimana artikel ini mendalami dinamika internal Finlandia dan Swedia dalam merespons ancaman dari Rusia. Kemudian pada metodologi penelitian ini menggunakan survei Gallup untuk menganalisis perubahan sikap publik dan bagaimana hal itu memengaruhi keputusan politik.

Kemudian yang kelima yakni penelitian yang ditulis oleh Sayed Mustafa Hussaini berjudul *"An In-depth Analysis of Sweden's Foreign Policy Towards Türkiye Surrounding its NATO Membership Bid"*. Penelitian ini membahas mengenai transformasi kebijakan luar negeri Swedia selama proses pengajuan

¹⁷ Vesa Kannianen, *Gallup Democracy In Exercising The NATO Membership Option: The Cases Of Finland And Sweden*, Cesifo Economic Studies, Vol, 68, No, 3, Oxford University, Hal. 295.

keanggotaan NATO fokus relasi dengan Turki. Awalnya, Swedia mengkritik catatan HAM Turki dan memberlakukan embargo senjata. Namun, invasi Rusia ke Ukraina memaksa Swedia untuk meninjau kembali prioritas keamanan, sehingga mereka berkompromi demi mendapatkan dukungan Turki untuk keanggotaan NATO¹⁸. Kesamaan penelitian ini terletak pada adanya dampak invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan Swedia mengubah orientasi keamanan internasionalnya, termasuk dalam melakukan diplomasi dengan Turki. Menggunakan analisis terhadap faktor-faktor politik eksternal dan internal yang mempengaruhi perubahan kebijakan serta fokus pada bagaimana Swedia harus menyesuaikan kebijakannya, terutama terkait masalah terorisme dan keamanan yang diangkat oleh Turki selama negosiasi NATO. Penelitian ini berbeda pada subjek yang digunakan, penelitian ini menitikberatkan pada Swedia dalam merubah kebijakan luar negerinya yang lebih berfokus pada periode perubahan kebijakan dalam konteks pengajuan NATO.

Keenam yakni penelitian yang ditulis oleh Afdhol Pratama Hadie Putra berjudul "Analisis Kebijakan Prancis Terhadap Keanggotaan Turki di Uni Eropa Era Emmanuel Macron (2017-2019)". Penelitian ini membahas kebijakan luar negeri Prancis dengan Turki selama masa kepemimpinan Presiden Emmanuel Macron. Penelitian ini menganalisis apa saja alasan utama Prancis menolak keanggotaan Turki di Uni Eropa meskipun terdapat hubungan bilateral yang penting antara kedua negara. Macron dan pemerintahannya menggunakan berbagai argument seperti, ketidakcocokan nilai-nilai Eropa, masalah hak asasi manusia, dan

¹⁸ Sayed Mustafa Hussaini, *An In-Depth Analysis of Sweden's Foreign Policy Towards Türkiye Surrounding Its NATO Membership Bid*, Tesis, Swedia, Linnaeus University, Hal. 60.

pengaruh Islam politik di Turki sebagai dasar untuk menolak akses Turki ke Uni Eropa¹⁹. Kesamaan penelitian ini terletak pada persamaan teori yang digunakan, adanya Isu keanggotaan dan Penolakan dimana kedua penelitian membahas bagaimana sebuah negara (Turki dalam konteks UE dan Swedia dalam konteks NATO) mengalami tantangan signifikan dalam upaya menjadi bagian dari aliansi atau organisasi internasional karena penolakan atau keberatan dari negara lain. Kedua penelitian menyoroti isu politik domestik dan keamanan internasional sebagai faktor utama dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini memiliki perbedaan pada bagian kepentingan negara penolak, dimana Prancis menolak Turki didorong oleh kekhawatiran tentang nilai-nilai Eropa dan masalah identitas budaya. Di sisi lain, Turki menolak keanggotaan Swedia di NATO lebih didasarkan pada kekhawatiran tentang kebijakan terkait kelompok-kelompok yang dianggap sebagai ancaman terorisme domestik, terutama yang terkait dengan PKK.

Selanjutnya yakni penelitian yang ditulis oleh Sulton Rofiudin Habib berjudul "Analisa Reorientasi Keberpihakan Turki dari AS ke Rusia dalam Konflik Suriah Tahun 2016". Penelitian ini membahas mengenai terjadi reorientasi kebijakan luar negeri Turki, di mana Turki mulai mendekat ke Rusia yang sebelumnya ke AS. Salah satu faktor utama perubahan ini adalah perbedaan pandangan antara Turki dan AS terkait dukungan AS kepada YPG di Suriah, yang oleh Turki dianggap terkait dengan PKK, kelompok teroris yang menjadi ancaman

¹⁹ Afdhol Pratama Hadie Putra, *Analisis Kebijakan Prancis Terhadap Keanggotaan Turki di Uni Eropa Era Emmanuel Macron (2017-2019)*, Skripsi, Yogyakarta: Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia, Hal. 15.

bagi keamanan domestik Turki²⁰. Kesamaan penelitian ini terletak pada teori konsep digunakan yakni realisme neoklasik. Penelitian ini memiliki perbedaan yakni Swedia berfokus pada peran Turki dalam NATO, sedangkan penelitian konflik Suriah lebih menekankan pada pergeseran hubungan bilateral antara Turki, AS, dan Rusia, serta konflik Suriah yang tidak langsung melibatkan NATO sebagai aktor utama.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Metodologi, Teori/Konsep	Hasil
1.	Muhammad Syaddad Hisbullah Strategi Negosiasi Pemerintah Swedia Terhadap Negara Turki Dalam Upaya Meratifikasi Keanggotaan NATO Tahun 2023.	Penelitian Kualitatif Deskriptif Teori <i>Strategies and Tactics in Negotiation</i>	Strategi negosiasi Swedia merupakan upaya untuk meredakan kekhawatiran Turki terkait isu-isu keamanan dan terorisme dengan menggunakan pendekatan negosiasi yang

²⁰ Sulton Rofiudin Habib, *Analisa Reorientasi Keberpihakan Turki Dari As Ke Rusia Dalam Konflik Suriah Tahun 2016*, Skripsi, Malang: Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang, Hal. 14.

			<p>fleksibel dan melibatkan dukungan internasional. Swedia berhasil mengamankan kesepakatan dengan Turki melalui kombinasi antara konsesi kebijakan, negosiasi diplomatik yang intensif, dan penguatan hubungan multilateral dengan anggota NATO lainnya.</p>
2.	Ilham Rilin Fiadi	<p>Penelitian Kualitatif</p>	<p>Menjelaskan perubahan kebijakan Swedia</p>

<p><i>Towards NATO Membership: Looking into the End of Sweden's Neutrality Amidst Strategic Shift in Europe</i></p>	<p>Realisme Neoklasik Konsep Aliansi</p>	<p>sebagai hasil kombinasi antara ancaman eksternal dari Rusia dan kondisi internal politik Swedia. Sementara itu, konsep aliansi membantu menjelaskan transisi Swedia dari posisi netral menjadi anggota penuh NATO, yang memberikan jaminan keamanan formal. Teori-teori ini digabungkan untuk menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Swedia didorong oleh interaksi antara</p>
---	--	--

			ancaman internasional dan dinamika domestik.
3.	<p>Theo Tsappos</p> <p><i>Sweden – “a Safe Haven” for Terrorists?</i></p> <p><i>Investigating the Strategic Elements in Türkiye’s Narrative of Sweden During the NATO Accession Process.</i></p>	<p>Penelitian Kualitatif</p> <p><i>Strategic Narratives Theory</i></p>	<p>Narasi Turki tentang Swedia sebagai tempat aman bagi teroris bukan hanya masalah keamanan, tetapi juga bagian dari strategi diplomatik yang lebih luas untuk mempengaruhi hasil proses aksesi NATO. Turki berhasil menggunakan narasi ini sebagai leverage untuk mendapatkan konsesi dari Swedia, terutama</p>

			<p>terkait isu terorisme dan kebijakan ekstradisi, dalam konteks negosiasi akses NATO. Serta bagaimana isu-isu keamanan, diplomasi dan narasi politik saling terkait dalam konteks hubungan internasional dan proses pengambilan keputusan aliansi strategis seperti NATO.</p>
4.	<p>Vesa Kannianen</p> <p><i>Gallup Democracy in Exercising the NATO</i></p>	<p>Penelitian Kuantitatif</p> <p><i>Gallup Surveys</i></p>	<p>Penelitian ini mengukur perubahan sikap masyarakat terhadap NATO</p>

	<p><i>Membership Option: The Cases of Finland and Sweden.</i></p>		<p>sebagai landasan untuk menganalisis bagaimana persepsi masyarakat dipengaruhi oleh peristiwa geopolitik dan bagaimana hal itu berdampak pada keputusan politik. Analisis ini didasarkan pada pengumpulan data sebelum dan sesudah peristiwa utama (invasi Rusia), serta penerapan analisis statistik untuk memahami tren perubahan dalam opini publik.</p>
5.	Sayed Mustafa Hussaini	<p>Penelitian Kualitatif</p>	<p>Penelitian ini menjelaskan</p>

	<p><i>An In-depth Analysis of Sweden's Foreign Policy Towards Türkiye Surrounding its NATO Membership Bid.</i></p>	<p><i>Role Theory Social Constructivism and Structural Realism</i></p>	<p>bagaimana identitas nasional Swedia yang selama ini berfokus pada netralitas bergeser menuju prioritas keamanan strategis. Penyesuaian kebijakan ini menggambarkan hubungan dinamis antara nilai-nilai dan kebutuhan strategis dalam konteks geopolitik yang berubah.</p>
6.	<p>Afdhol Pratama Hadie Putra</p> <p>Analisis Kebijakan Prancis Terhadap Keanggotaan Turki di Uni Eropa Era</p>	<p>Penelitian Kualitatif</p> <p>Konstruktivisme</p>	<p>Penerapan teori konstruktivisme dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Prancis terhadap</p>

	Emmanuel Macron (2017-2019)		<p>keanggotaan Turki di Uni Eropa didasarkan oleh nilai-nilai, identitas, dan persepsi tentang apa yang seharusnya menjadi bagian dari "keluarga" Uni Eropa. Melalui narasi politik dan diplomasi nilai, Macron membentuk kebijakan luar negeri yang menekankan pentingnya menjaga integritas nilai-nilai Eropa dan menggunakan aturan-aturan Uni</p>
--	-----------------------------	--	---

			Eropa untuk membatasi ekspansi organisasi terhadap negara yang dianggap tidak sesuai dengan standar tersebut.
7.	<p>Sulton Rofiudin Habib</p> <p>Analisa Reorientasi Keberpihakan Turki dari AS ke Rusia dalam Konflik Suriah Tahun 2016</p>	<p>Penelitian Eksplanatif</p> <p>Realisme Neoklasik</p>	<p>Turki merupakan negara yang memiliki kedekatan dengan negara barat, dapat dilihat dari dukungan dari Turki serta AS kepada oposisi dan sekutunya di konflik Suriah.</p> <p>Tetapi 2016, Turki mulai mereorientasi pilihannya dalam konflik Suriah terutama setelah</p>

		<p>Insiden penembakan pesawat tempur Su-24 milik Rusia oleh jet F-16 milik Turki menjadi pemicu. Perubahan kebijakan luar negeri ini dipengaruhi oleh dua hal utama, yaitu faktor dari luar negeri dan juga dinamika di dalam negeri.</p>
--	--	---

1.5 Kerangka Teori dan Konsep

1.5.1 Realisme Neoklasik

Penulis menganalisis pertanyaan dari rumusan masalah dengan Realisme Neoklasik yang digagas oleh Gideon Rose pada tahun 1998. Dalam karyanya yang berjudul *"Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy"* berusaha menggabungkan perspektif dari Realisme Klasik dan Neorealisme, yang kemudian melahirkan sebuah pendekatan baru bernama Realisme Neoklasik. Pendekatan ini

digunakan penulis untuk memahami perubahan sikap Turki terhadap proses keanggotaan Swedia di NATO.

Teori Realisme Neoklasik merupakan pengembangan dari teori besar Realisme. Berbeda dengan Realisme Klasik yang menekankan peran individu atau pemimpin dalam menentukan kebijakan luar negeri, Neorealisme justru melihat bahwa kebijakan suatu negara lebih dipengaruhi oleh situasi dalam sistem internasional dan kekuatan relatif antar negara. Walaupun Realisme Klasik dan Neorealisme memiliki perbedaan pandangan, keduanya sama-sama berlandaskan pada asumsi bahwa sistem internasional bersifat anarki. Oleh karena itu, demi melindungi diri dari ancaman luar dan untuk mencapai kepentingan nasionalnya, setiap negara perlu memperkuat kekuatan di dalam negeri²¹.

Realisme Neoklasik muncul sebagai kritik terhadap pandangan Neorealisme berpandangan bahwa meskipun sistem internasional bersifat anarkis dan kekuatan antar negara berbeda-beda, hal tersebut tidak serta-merta menjadi penentu utama dalam pengambilan kebijakan luar negeri oleh para pemimpin. Di sisi lain, Realisme Neoklasik juga menyoroti kelemahan Realisme Klasik yang dinilai terlalu sering mengabaikan respons para pemimpin terhadap tekanan dari sistem internasional yang bisa mengancam keberlangsungan negara mereka. Oleh karena itu, Realisme Neoklasik hadir untuk melengkapi dan menyempurnakan

²¹ Sulton Rofiudin Habib, *Analisa Reorientasi Keberpihakan Turki Dari AS Ke Rusia Dalam Konflik Suriah Tahun 2016*, Skripsi, Malang: Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang, Hal. 14.

kedua pendekatan tersebut, terutama dalam memahami dan menganalisis perubahan kebijakan suatu negara²².

Dalam karyanya yang berjudul *"Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy"* Gideon Rose mengatakan *"Neoclassical realism it explicitly incorporates both external and internal variables, updating and systematizing certain insights drawn from classical realist thought. Its adherents argue that the scope and ambition of a country's foreign policy is driven first and foremost by its place in the international system and specifically by its relative material power capabilities. This is why they are realist. They argue further, however, that the impact of such power capabilities on foreign policy is indirect and complex, because systemic pressures must be translated through intervening variables at the unit level. This is why they are neoclassical."*²³.

Realisme Neoklasik memandang bahwa tindakan suatu negara dalam hubungan internasional tidak semata-mata dipengaruhi oleh posisinya dalam tatanan global yang tanpa otoritas pusat. Teori ini juga mempertimbangkan faktor internal, seperti sejauh mana seorang pemimpin memiliki legitimasi dalam membuat keputusan, yang dipengaruhi oleh seberapa besar kekuatan atau kapabilitas yang dimiliki negara tersebut. Menurut pandangan ini, kekuatan suatu negara ditentukan oleh berbagai hal seperti kekuatan ekonomi, militer, sumber daya alam, dan karakter internal lainnya. Realisme Neoklasik menyatakan bahwa arah

²² Robert Jackson And Georg Sorensen, 2013, *Pengantar Studi Hubungan Internasional: Teori dan Pendekatan*, Edisi Ke 5, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Hal. 151.

²³ Gideon Rose, 1998, *Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy*, Vol, 51, No, 1, Cambridge University Press, Hal. 146.

kebijakan luar negeri suatu negara ditentukan tidak hanya oleh kondisi di tingkat global, tetapi juga oleh dinamika politik domestik, khususnya seberapa besar legitimasi yang dimiliki oleh para pemimpinnya.²⁴

Terdapat empat faktor dalam variabel domestik yakni persepsi elite, relasi pemerintah-masyarakat, kultur strategis (*strategic culture*) serta institusi domestik. Faktor inilah yang berperan sebagai '*filter*' penerjemah variabel struktur internasional. Persepsi elite adalah faktor yang berkaitan dengan aspek personal membuat kebijakan luar negeri, seperti presiden, menteri luar negeri, perdana menteri, menteri pertahanan dan orang-orang di sekitar pemegang kekuasaan. Literatur analisis kebijakan luar negeri mengatakan variabel ini melalui pendekatan idiosinkratik dengan fokus pada unsur kepribadian pembuat kebijakan. Saat menggunakan analisa kebijakan luar negeri dengan variabel ini, harus mampu menganalisis bagaimana elite memandang variabel struktur internasional²⁵.

Kemudian relasi pemerintah-masyarakat menyangkut keterlibatan publik dalam mempengaruhi pemerintah. Kebijakan luar negeri tidak semata-merta memonopoli pemerintah melainkan adanya campur tangan dari publik juga. Publik mencakup banyak aktor domestik mulai partai politik, media massa, lembaga masyarakat, kelompok kepentingan dan lain sebagainya. Pengaruh dari aktor ini tentunya cukup besar terhadap negara dengan sistem demokrasi, di mana keberadaan mereka diakui dan aktivitasnya dijamin dalam konstitusi. Jika ingin menjelaskan mengenai kebijakan luar negeri dengan variabel ini, maka harus

²⁴ *Ibid*, Hal. 148.

²⁵ Mohamad Rosyidin, 2020, *Teori Hubungan Internasional*, Depok: Rajawali Pers, Hal. 41.

mampu menunjukkan bagaimana peran dari aktor dalam merespon dinamika internasional dan mempengaruhi kebijakan di level pemerintah²⁶.

Selanjutnya, kultur strategis dapat dipahami dengan seperangkat gagasan, norma atau keyakinan guna mengartikan konsep ancaman dan menyediakan cara menghadapinya. Kultur strategi sendiri terdapat dua bentuk yakni budaya organisasi dan paradigma. Budaya organisasi diambil melalui suatu lembaga formal pemerintahan, misalnya militer, kementerian pertahanan serta kementerian luar negeri. Militer pada umumnya memiliki seperangkat norma, baik itu tertulis ataupun tidak terkait adanya ancaman dan bagaimana cara mereka menanggulangnya. Sedangkan paradigma diyakini oleh negara yang termanifestasi ke dalam contohnya undang-undang, buku putih kebijakan luar negeri, buku putih pertahanan serta peraturan pemerintah yang berkaitan dengan isu pertahanan keamanan serta politik luar negeri tentunya. Di dalamnya biasanya terurai mengenai hakikat keamanan negara serta sumber-sumber ancaman nasional. Ketika ingin menggunakan variabel ini guna menganalisis kebijakan luar negeri, maka harus mampu menunjukkan bagaimana kultur strategis suatu negara atau lembaga pemerintahan dalam menafsirkan adanya ancaman geopolitik di lingkungan internasional²⁷.

Institusi domestik mengacu kepada lembaga formal di tingkat negara, seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam perumusan kebijakan luar negeri, lembaga formal ini memberikan pengaruh yang sangat signifikan. Misalnya

²⁶ *Ibid*, Hal. 42.

²⁷ Mohamad Rosyidin, 2020, *Teori Hubungan Internasional*, Depok: Rajawali Pers, Hal. 41.

kebijakan suatu negara meratifikasi konvensi internasional yang tak lepas dari tarik menarik kepentingan di ranah legislatif. Dinamika politik domestik tentunya lebih menentukan di mana kekuasaan antar partai politik akan sangat berpengaruh pada keputusan yang diambil pemerintah. Menganalisis kebijakan luar negeri dengan variabel institusi domestik tentunya tidak boleh terlepas dari adanya konteks eksternal, baik di level regional maupun global²⁸.

Para pemimpin atau elit politik suatu negara memiliki peran penting dalam menilai apakah situasi internasional membawa peluang atau ancaman bagi kepentingan nasional. Namun, mereka tidak bisa bertindak sebebaskan mungkin dalam memanfaatkan sumber daya negara. Keputusan yang mereka buat harus disesuaikan dengan kondisi negara dan masyarakatnya, karena besarnya sumber daya yang dimiliki akan memengaruhi bagaimana sumber daya itu dialokasikan untuk kebijakan luar negeri²⁹.

Dalam karyanya, Gideon terus menjelaskan mengenai Dalam pendekatan Realisme Neoklasik, pengambilan kebijakan luar negeri tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi juga mempertimbangkan faktor internal. Negara tidak langsung merespons tekanan atau insentif dari sistem internasional (Systemic Incentive/Pressure), melainkan melalui penyaringan oleh variabel antara (Intervening Variable) sebelum menghasilkan kebijakan luar negeri (Foreign Policy). Artinya, dalam merumuskan kebijakan, negara tidak hanya melihat tekanan

²⁸ *Ibid*, Hal. 42.

²⁹ Mohamad Rosyidin, 2020, *Teori Hubungan Internasional*, Depok: Rajawali Pers, Hal. 151.

dari luar, tetapi juga memperhitungkan kekuatan domestik, khususnya kekuatan relatif material, untuk menilai ancaman maupun peluang yang ada³⁰.

Tabel 1.2 Alur Pemikiran

<i>Systemic Incentive</i> (Faktor Eksternal)	<i>Intervening Variable</i> (Faktor Internal)	<i>Dependent Variable</i>
<p>Tekanan Multilateral: -NATO memfasilitasi pertemuan antara Turki, Swedia dan Finlandia. Sekretaris Jendral NATO beberapa kali mengunjungi Ankara.</p> <p>Tekanan Bilateral: -Amerika Serikat melalui penawaran modernisasi armada Turki dengan jet tempur F-16</p>	<p>Persepsi elite Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan terhadap adanya ancaman dari PKK atau YPG di Swedia guna kepentingan domestik keamanan negaranya.</p> <p>Terpenuhinya tuntutan kepada Swedia yang menguntungkan negara Turki seperti JETCO dan dukungan ke Uni Eropa.</p>	<p>Reorientasi sikap politik Turki terkait keanggotaan Swedia di NATO dengan adanya Trilateral Memorandum</p>

³⁰ Gideon Rose, 1998, *Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy*, Vol, 51, No, 1, Cambridge University Press, Hal. 146.

<p>-Jerman menekan Turki dengan memberikan dukungan penuh terhadap Swedia</p> <p>-Prancis menekankan Turki pada pentingnya solidaritas NATO</p>	<p>Kebutuhan Erdogan mempertahankan kekuasaan dan memenangkan Pemilu 2023.</p> <p>Citra nasionalis dan kepemimpinan kuat yang ingin dibangun Erdogan.</p>	
---	---	--

Teori ini digunakan oleh penulis guna mengkaji reorientasi sikap politik Turki terkait keanggotaan Swedia di NATO. *Systemic Incentive* atau faktor eksternal yakni adanya tekanan multilateral dari NATO dan tekanan bilateral dari Amerika Serikat, Jerman dan Prancis. Negara-negara ini secara aktif mendesak Turki untuk tidak memblokir akses Swedia, baik melalui dialog langsung maupun pengaruh diplomatik dalam forum NATO. Faktor eksternal lalu diterjemahkan oleh *intervening variable* lalu dihubungkan dengan kondisi internal dan persepsi elite dari Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sebagai tokoh politik yang paling berpengaruh memainkan peran dalam perubahan sikap Turki terkait akses Swedia di NATO. Erdogan mengambil keputusan politik dengan dipengaruhi oleh persepsinya terhadap adanya ancaman domestik serta internasional. Ancaman

keamanan dari PKK atau YPG, di mana Erdogan memandang aktivitas dari kelompok ini merupakan ancaman bagi kedaulatan dan keamanan nasional Turki.

Persepsi Swedia memberikan perlindungan kepada kaum Kurdistan menyebabkan Turki menolak akses Swedia pada awalnya. Erdogan menafsirkan tindakan Swedia sebagai ancaman langsung kestabilan domestik Turki, terlebih lagi Turki harus berjuang melawan separatisme di dalam negeri. Sikap elite politik Turki tentunya mulai berubah setelah Swedia menyetujui perjanjian melakukan perubahan kebijakan mengenai kelompok teroris Kurdi. Salah satunya yakni dengan melakukan reformasi Undang-Undang antiterorisme serta menyetujui ekstradisi individu yang menjadi buronan Turki. Dengan adanya komitmen dari Swedia yang lebih tegas terhadap PKK atau YPG ini tentunya merubah persepsi Erdogan terhadap ancaman keamanan nasional Turki.

Persepsi elit dari Erdogan terhadap adanya ancaman PKK dan YPG serta kemampuan dalam memobilisasi sumber daya domestiknya yakni adanya kepentingan Turki dalam menjaga keamanan domestik, sehingga melalui teori ini dapat mengidentifikasi mengenai persepsi elit serta domestik yang kemudian di filter melalui intervening variabel hingga terbentuknya kebijakan luar negeri Turki guna tercapainya kepentingan nasional.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Menurut Mohtar Mas' oed, terdapat tiga tujuan akhir sains yakni deskripsi, eksplanasi dan prediksi ketika ilmuwan politik menjelaskan dan meramal suatu

fenomena³¹. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian eksplanasi. Peneliti memiliki tujuan dalam menjawab fenomena yang akan diteliti, kemudian menganalisisnya. Dalam penelitian ini, fenomena yang akan dijelaskan yakni mengapa terjadi perubahan orientasi sikap politik Turki terkait keanggotaan Swedia di NATO dikarenakan pada awalnya Turki menolak Swedia dengan dugaan Swedia mendukung kelompok Kurdi PKK atau YPG sebagai gerakan terorisme yang mengancam keamanan negara Turki dan keamanan anggota NATO lainnya. Namun, setelah melakukan diplomasi, negosiasi dan tekanan beberapa pihak, Turki akhirnya meratifikasi Swedia bergabung NATO.

1.6.2 Metode Analisis

Penelitian ini memakai analisis kualitatif, yaitu cara mengolah data yang bukan berupa angka menjadi informasi yang bermakna. Menurut Sugiyono, pendekatan ini muncul karena adanya perubahan cara pandang dalam memahami suatu peristiwa atau fenomena. Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan bukan berdasarkan teori yang sudah ada, melainkan dari temuan langsung di lapangan. Karena itulah, analisis data dilakukan secara induktif—artinya dimulai dari fakta-fakta yang ditemukan, lalu dari situ disusun kesimpulan atau dugaan sementara atau hipotesis³².

³¹ Mohtar Mas'oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*, Edisi Ke-1, Jakarta: LP3ES, 1990, Hal. 78-80.

³² Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si, 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan I, Syakir Media Press, hal. 80.

1.6.3 Tingkat Analisa

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat unit analisa dan unit eksplanasi. Unit analisa adalah objek yang akan dijelaskan dalam penelitian ini, biasanya disebut variabel dependen. Sedangkan unit eksplanasi yakni dampak dari objek yang hendak diamati, biasanya disebut variabel independent³³. Unit analisa atau variabel dependen terletak pada level negara yaitu perubahan sikap Turki terkait keanggotaan Swedia di NATO, kemudian untuk unit eksplanasinya atau variabel independent terletak pada level individu yakni persepsi elite Erdogan sebagai pembuat kebijakan. Sehingga tingkat analisa penelitian ini bersifat reduksionis, dilihat dari unit eksplanasi lebih rendah dari unit analisisnya.

1.6.4 Variabel Penelitian

Terdapat variabel dependen yakni perubahan sikap Turki terkait keanggotaan Swedia di NATO kemudian variabel independen yakni persepsi elite Erdogan sebagai pembuat kebijakan.

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian

a. Batasan Materi

Batasan materi berawal dari penolakan Swedia bergabung keanggotaan NATO oleh Turki pada tahun 2022 karena adanya dugaan ancaman keamanan oleh kelompok terorisme PKK atau YPG yang mendapat perlindungan oleh Swedia,

³³ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*. Edisi Ke-1. (Jakarta:LP3ES, 1990), 43-48.

hingga pada akhirnya tahun 2024 Turki resmi mendukung akses Swedia bergabung keanggotaan NATO.

b. Batasan Waktu

Batasan waktu mulai tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022 Swedia dan Finlandia resmi meminta bergabung dalam keanggotaan NATO, namun Turki menolak hal tersebut. Hingga di tahun 2023 hanya negara Finlandia yang telah mendapatkan persetujuan bergabung NATO dan pada tahun 2024 Swedia resmi bergabung NATO.

1.6.6 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Bersifat studi pustaka dengan menelaah berdasarkan data diperoleh dari referensi sekunder. Referensi digunakan pada penelitian ini yakni referensi sudah dikelola dalam bentuk dokumen baik secara tulisan maupun lisan. Data ini diantaranya yakni jurnal, artikel, buku dan sumber lain dari laman internet. Sumber-sumber ini menjadi referensi penulis kemudian diolah menjadi karya ilmiah baru.

1.7 Hipotesa

Reorientasi sikap politik Turki terhadap keanggotaan Swedia di NATO dipengaruhi oleh interaksi dari faktor eksternal (*Systemic Incentive*) yakni adanya tekanan multilateral dari NATO dan tekanan bilateral dari Amerika Serikat, Jerman dan Prancis. Negara-negara ini secara aktif mendesak Turki untuk tidak memblokir akses Swedia di NATO guna pertahanan keamanan Eropa dan menjaga solidaritas

aliansi. Kemudian faktor internal (*Intervening Variable*) yakni persepsi elite Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan terkait adanya ancaman keamanan dari PKK atau YPG sebagai ancaman bagi kedaulatan dan keamanan nasional Turki karena Swedia memberikan perlindungan kepada PKK dan YPG. Hal ini menyebabkan Turki menolak akses Swedia pada awalnya. Sikap elit Erdogan tentunya mulai berubah setelah Swedia menyetujui Trilateral Memorandum dengan adanya komitmen dari Swedia yang lebih tegas terhadap PKK atau YPG ini tentunya merubah persepsi Erdogan terhadap ancaman keamanan nasional Turki.

1.8 Struktur Penulisan

Tujuan utama dari penulisan ini adalah untuk memahami alasan di balik perubahan sikap politik Turki terhadap keanggotaan Swedia di NATO. Secara umum, tulisan ini terbagi menjadi lima bab, di mana setiap bab membahas tema tertentu secara khusus. Masing-masing tema kemudian dijabarkan lagi ke dalam sub-sub bab untuk memperdalam dan memperjelas pembahasan. Dengan penyusunan yang terstruktur seperti ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh pemahaman yang utuh dan menyeluruh terhadap topik yang dibahas.

Tabel 1.3 Sistematika Penulisan

<p>BAB I</p> <p>PENDAHULUAN</p>	<p>1.1 Latar Belakang Masalah</p> <p>1.2 Rumusan Masalah</p> <p>1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian</p> <p> 1.3.1 Tujuan Penelitian</p> <p> 1.3.2 Manfaat Penelitian</p> <p>1.4 Penelitian Terdahulu</p> <p>1.5 Kerangka Teori dan Konsep</p> <p> 1.5.1 Realisme Neoklasik</p> <p>1.6 Metode Penelitian</p> <p> 1.6.1 Jenis Penelitian</p> <p> 1.6.2 Metode Analisis</p> <p> 1.6.3 Tingkat Analisa</p> <p> 1.6.4 Variabel Penelitian</p> <p> 1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian</p> <p> 1.6.6 Teknik dan Alat</p> <p> Pengumpulan Data</p> <p>1.7 Hipotesa</p> <p>1.8 Struktur Penulisan</p>
<p>BAB II</p> <p>REORIENTASI SIKAP TURKI</p> <p>TERKAIT PROPOSAL</p>	<p>2.1 Proposal Swedia Bergabung</p> <p> NATO</p>

<p>KEANGGOTAAN SWEDIA DI NATO</p>	<p>2.2 Turki Menolak Akses Swedia bergabung NATO</p> <p>2.3 Turki Meratifikasi Akses Swedia bergabung NATO</p>
<p>BAB III</p> <p>TEKANAN EKSTERNAL DAN KONDISI POLITIK DOMESTIK TURKI</p>	<p>3.1 Tekanan Multilateral dari NATO</p> <p>3.2 Tekanan Bilateral dari Amerika, Jerman dan Prancis</p> <p>3.3 Kondisi Politik Domestik Turki</p>
<p>BAB IV</p> <p>ANALISA FAKTOR EKSTERNAL DAN FAKTOR INTERNAL DALAM PERSPEKTIF RECEP TAYYIP ERDOGAN SEBAGAI PEMBUAT KEBIJAKAN LUAR NEGERI TERHADAP AKSESI SWEDIA DI NATO</p>	<p>4.1 Ratifikasi Swedia dalam NATO: Antara Kepentingan Nasional dan Kepentingan Politik Erdogan Menang Pemilu</p> <p>4.1.1 Kepentingan Politik Erdogan Menang Pemilu</p>
<p>BAB V</p> <p>PENUTUP</p>	<p>5.1 Kesimpulan</p> <p>5.2 Saran</p>